

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Cetakan Pertama. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cetakan Pertama. Gunung Agung, Jakarta.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cetakan Ketujuh. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering*. Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing, Malang.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Cst. Kansil *et all*. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Cetakan Pertama. Kencana Media Group, Jakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Cetakan Pertama. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dwidja Priyantno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Refika Aditama, Bandung.

- E. Fernando M. Manullang. 2017. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Cetakan Kedua. Kencana, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. LaksBang Pressindo Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hernold Ferry Wakawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan Pertama. Thafa Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqi. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Cetakan Kedua. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Juniver Girsang. 2012. *Abuse Of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. JG Publishing, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Cetakan Kedelapan. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2022. *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, Dan Praktik*. Cetakan Pertama. Prenadamedia Group, Jakarta.
- M. Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering*. Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Irfan Islamy. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan Keempat Belas. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta.

- Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan Kedua. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keempat. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Kencana, Jakarta.
- R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian: Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung, Jakarta.
- Rocky Marbun. 2019. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Setara Press, Malang.
- Roeslan Saleh. 1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Cetakan Kelima. Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Cetakan Pertama. Buku Kompas, Jakarta.
- Rudi Pardede. 2017. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Cetakan Kedua. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Pertama. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Liberty, Yogyakarta.
- Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Cetakan Pertama. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sujono. 2020. *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Gugatan Perdata Negara*. Cetakan Pertama. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Susan Rose-Ackerman, diterjemahkan oleh Toenggol P. Siagian. 2010. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*. Cetakan Kedua. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tatiek Sri Djatmiati *et all*. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi: Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Ketiga. Indonesia Lawyer Club, Jakarta.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Cetakan Pertama. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung.
- Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Pertama. Thafa Media, Yogyakarta.

Kamus

- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi IV. Gramedia, Jakarta.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Cetakan Kedua. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Cetakan Pertama. Arkola, Surabaya.

Disertasi

Sahuri Lasmadi. 2003. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”. Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Jurnal

M. Agus Santoso. 2011. “Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara”. *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 7, Nomor 2.

Rena Yulia. 2019. “Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata*. Volume 2, Nomor 9.

Suhendar dan Kartono. 2020. “Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Keadilan*. Volume 11, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2958).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2851).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965

Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983

Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.